

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, dalam perkembangannya, kinerja instansi pemerintah mulai menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah tujuan suatu program yang ditetapkan telah tercapai dan apakah dalam mencapai tujuan suatu program tersebut telah dilakukan dengan prinsip ekonomis, dengan cara yang efisien, dan dengan hasil yang efektif. Masyarakat juga ingin mengetahui apakah kegiatan oleh pemerintah dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam era reformasi ini, keinginan dan tuntutan masyarakat belum sepenuhnya dapat terpenuhi apabila hanya didasarkan pada hasil audit laporan keuangan yang hanya memuat opini, perbandingan anggaran realisasi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan saja (Pedoman audit kinerja atas instansi pemerintah, 2006)

Audit kinerja merupakan kunci utama untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pertanggung jawaban kepada masyarakat. Audit ini akan memberikan tingkat keyakinan atas informasi yang dilaporkan mengenai hasil program atau kegiatan, demikian pula dalam hubungannya dengan sistem pengendalian intern dalam organisasi/lembaga. Kegiatan audit juga akan dapat memberikan arah kepada perbaikan pengelolaan pemerintah, pengambilan keputusan, dan pertanggung jawaban kepada publik. Tuntutan akan terselenggaranya suatu pemerintah yang bersih serta tersedianya pelayanan kepada publik yang lebih baik merupakan kecenderungan yang semakin nyata dari hari ke hari.

Pemerintah diharapkan secara terus menerus mengevaluasi diri serta melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan agar bisa bekerja secara baik, efektif, efisien, dan ekonomis. Untuk menunjang pemenuhan tuntutan tersebut, peran audit kinerja di

pemerintahan merupakan kebutuhan yang mutlak untuk segera diterapkan pada masa sekarang maupun di masa masa yang akan datang (pedoman audit kinerja atas instansi pemerintahan, 2016). Dengan demikian, seiring dengan tuntutan masyarakat agar instansi pemerintah meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya, maka audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan saja tetapi melakukan audit atas program yang dijalankan (pedoman audit Pamsimas pada BPKP, 2015)

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini instansi yang dimaksud adalah BPK. BPK (Badan Pengawas Keuangan) adalah badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam pemerintahan khususnya di Indonesia kita juga mengenal badan yang berhak melakukan audit yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP merupakan lembaga pemerintah non kementerian indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan, dalam upaya mewujudkan transparansi dana akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan memberi hasil pemeriksaan yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan good and clean government yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah indonesia telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmennya dengan meluncurkan program nasional Akses Universal Air Minum dan sanitasi Tahun 2019 dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk di Indonesia. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah dan pemerintah daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

BPKP sebagai instansi pemerintahan yang memiliki sumber daya manusia dalam bidang auditing, manajemen dan akuntansi akan berperan dalam mendorong atau sebagai pemicu terjadinya suatu proses pembaruan dibidang manajemen pemerintahan. BPKP melaksanakan audit kinerja pada program PAMSIMAS akan menggunakan pedoman dalam audit kinerja yang beirsi prosedur prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu langkah berikutnya diharapkan dapat mengembangkan secara sistematis prosedur pelaksanaan audit kinerja atas program Pamsimas pada BPKP perwakilan provinsi Sumatra Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu “ Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja atas program penyediaan air dan sanitasi berbasis masyarakat pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatra Barat? ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan audit kinerja program Pamsimas pada BPKP perwakilan Sumatera Barat.
2. Mengetahui standar/ukuran yang digunakan BPKP dalam melakukan review kinerja.

3. Mengetahui pengendalian mutu yang dilaksanakan BPKP dalam menjaga kualitas laporan hasil auditan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya:

- a. Bagi penulis

Penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengetahui perbandingan antara tinjauan secara teoritis dengan tinjauan secara empiris, sehingga penulis dapat menuangkan hasil dalam bentuk tugas akhir.

- b. Bagi perguruan tinggi

Diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan di bidang ilmu keuangan negara dan daerah pada umumnya dan bidang ilmu audit pada khususnya

- c. Bagi kantor BPKP

Penulisan tugas akhir dari kegiatan magang yang dilakukan di kantor BPKP kota padang ini diharapkan akan dapat mendorong peningkatan peran BPKP dalam menyempurnakan dan mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan kegiatan pengawasan dan audit kinerja.

1.5 Sistematika Penulis

Sistematika penulisan tugas akhir terdiri dari tiga bagian meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang pengertian prosedur, audit dan audit kinerja, tujuan dan manfaat audit kinerja, prosedur pelaksanaan audit kinerja, gambaran umum PAMSIMAS

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini meliputi gambaran umum instansi, sejarah berdirinya, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan produk layanan.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membicarakan mengenai hasil analisis dan pembahasan masalah pada BPKP perwakilan Sumatera Barat

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dan analisis kegiatan magang, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



